

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
pada FISIP UPN : “Veteran” JAWA TIMUR**



Oleh :

ERNI PURNAMA SARI
NPM : 0541010091

**YAYASAN KEJUANGAN PANGLIMA BESAR SUDIRMAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JATIM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURABAYA
2011**

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

Disusun Oleh:

ERNI PURNAMA SARI

NPM : 0541010091

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Hartono Hidayat, MSi
Nip.030 115 320

**Mengetahui,
DEKAN**

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

Disusun Oleh:
ERNI PURNAMA SARI
NPM : 0541010091

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji
Skripsi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 24 february 2011**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Tim Penguji:

1.

Drs. Hartono Hidayat, MSi
Nip.030 115 320

Drs. Hartono Hidayat, MSi
Nip.030 115 320
2.

Dr. Slamet Srijono, MSi
Nip.130 286 546
3.

Dra. Diana Hertati, MSi
NIP.19660 1031 98903 2001

Mengetahui,
DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 19550718 198302 2 00 1

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN
GRESIK**

Nama Mahasiswa : Erni Purnama Sari
NPM. : 0541010091
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah Direvisi dan Disahkan pada tanggal :

PENGUJI I

Menyetujui

PENGUJI II

PENGUJI III

Drs. Hartono Hidayat, MSi
Nip.030 115 320

Dr. Slamet Srijono, MSi
Nip.130 286 546

Dra. Diana Hertati, MSi
NIP. 19660 1031 98903 2001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :
“FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya Drs. Hartono sebagai dosen pembimbing yang penuh ketulusan dan kesabaran. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan motivasi hingga terselesainya penulisan Skripsi ini. Kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bpk. Dr. Lukman Arif, Msi selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional
3. Ibu Dra. Diana Hertati, Msi selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional
4. Seluruh Dosen Universitas Pembangunan Nasional.
5. Semua pihak Pemda Kab Gresik dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu penulis dalam menyusun laporan Skripsi ini
6. Kedua orang tua (Bapak H. Nur Moh Syamil dan Hj. Yasmonah) yang selalu memberikan do'anya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Laporan Skripsi ini banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan ini yang bersifat membangun.

Surabaya, Pebruari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusahan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Otonomi Daerah.....	14
2.2.2 Keuangan Daerah.....	20

2.2.3 Sumber – Sumber Penerimaan Daerah.....	22
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.3 Kerangka Berpikir	46
2.4 Hipotesis	48
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	50
3.2 Populasi dan sampel.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4 Teknik Analisa Data.....	52
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum obyek penelitian dan penyajian data.....	55
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	68
4.3 Pembahasan.....	76
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

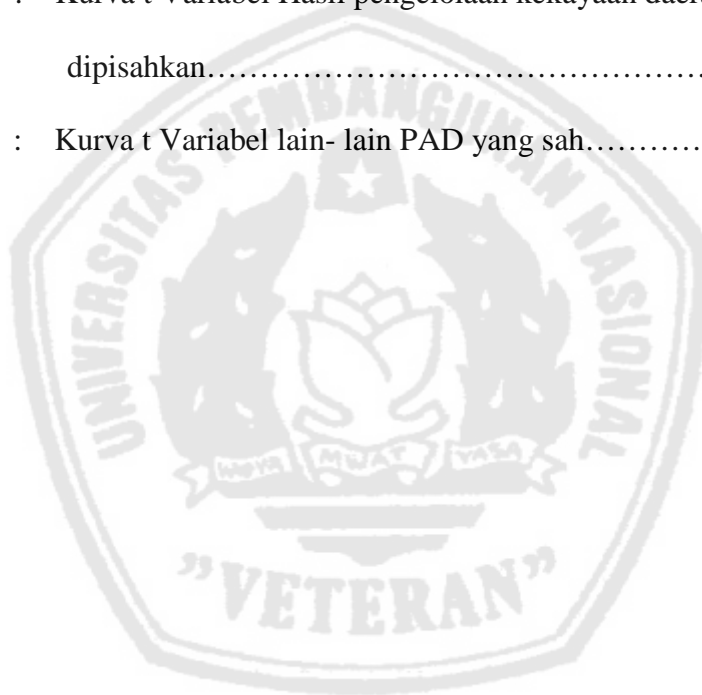
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perkembangan PAD Kab Gresik Tahun Anggaran 2000 - 2009.....	5
Tabel 4.1 : Jumlah penduduk kabupaten Gresik tahun 2009.....	58
Tabel 4.2 : Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik tahun 2009.....	58
Tabel 4.3 : Mata Pencarian penduduk Kabupaten Gresik tahun 2009.....	59
Tabel 4.4 : Kondisi Perekonomian Kabupaten Gresik tahun 2009.....	60
Tabel 4.5 : Industri Kabupaten Gresik tahun 2009	60
Tabel 4.6 : Rekapitulasi PAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2000 – 2009..	61
Tabel 4.7 : Rekapitulasi Pajak Daerah dan PAD Kab Gresik Tahun Anggaran 2000-2009.....	63
Tabel 4.8 : Rekapitulasi Retribusi Daerah dan PAD Kab Gresik Tahun Anggaran 2000 – 2009.....	65
Tabel 4.9 : Rekapitulasi hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2000 – 2009.....	66
Tabel 4.10 : Rekapitulasi Lain – lain PAD yang sah Tahun 2000- 2009	67
Tabel 4.11 : Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Sederhana pajak.....	68
Tabel 4.12 : Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Sederhana	69
Tabel 4.13 : Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Sederhana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	70
Tabel 4.14 : Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Sederhana lain- lain PAD yang sah.....	71

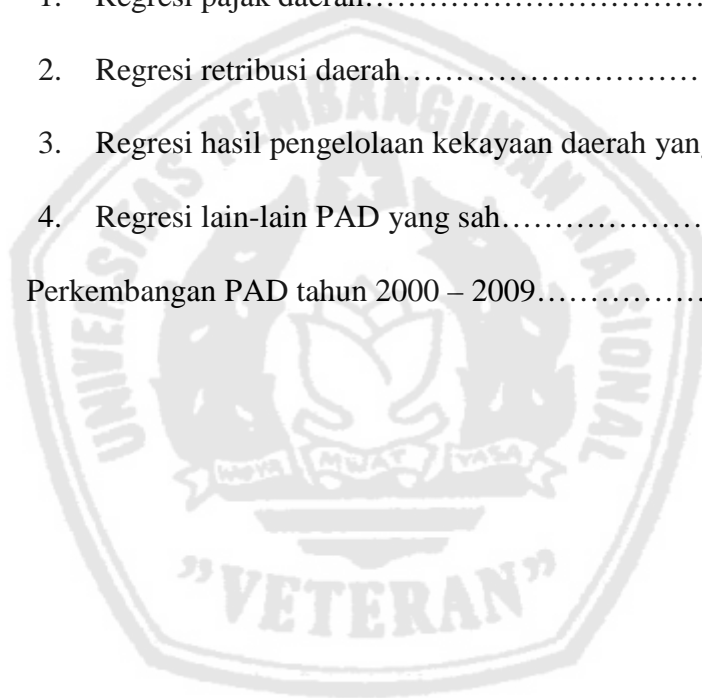
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Alur Berpikir.....	46
Gambar 2	: Kurva t variabel pajak	73
Gambar 3	: Kurva t Variabel Retribusi.....	74
Gambar 4	: Kurva t Variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.....	75
Gambar 5	: Kurva t Variabel lain- lain PAD yang sah.....	75



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2000 – 2009.....
- Lampiran 2 : Tabel Hasil Penghitungan Regresi Linier Sederhana
1. Regresi pajak daerah.....
 2. Regresi retribusi daerah.....
 3. Regresi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan....
 4. Regresi lain-lain PAD yang sah.....
- Lampiran 3 : Perkembangan PAD tahun 2000 – 2009.....



ABSTRAKSI

Erni Purnama Sari NPM 0541010091 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. “FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK”.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena besarnya tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gresik yang tiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan PAD Gresik, menempati tiga besar di Jatim bersama Surabaya dan Sidoarjo. Besarnya tingkat Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut juga berkonsekuensi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD yang terdiri dari : pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka Gresik akan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya yang akan membawa Kabupaten Gresik pada kemajuan dan membawa masyarakat Gresik pada keadaan yang sejahtera. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh masing- masing faktor sumber PAD {pajak (X_1), retribusi (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan lain-lain PAD yang sah (X_4)} terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik. Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing- masing faktor sumber PAD (pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik.

Dalam analisis data untuk mengetahui besarnya pengaruh masing- masing faktor sumber PAD (pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana. Sedangkan untuk uji hipotesis digunakan uji t. Dari hasil analisis regresi dan hasil uji t menunjukkan bahwa masing – masing faktor sumber PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan besarnya pengaruh masing- masing variabel adalah pajak 95,4%, retribusi 54,1%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 86%, dan lain-lain PAD yang sah 58,7%. Artinya pajak daerah mempunyai koefisien determinasi yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dapat disarankan : Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pajak daerah, mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik, maka sebaiknya Pemda Kabupaten Gresik meningkatkannya sehingga devisa daerah dapat bertambah demi kesejahteraan masyarakat Gresik. Untuk retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seharusnya dicarikan alternatif untuk mengurangi adanya fluktuasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata.

Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara semua bidang (Lincoln, 1997 : 10).

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada bulan Januari 2001 menyebabkan daerah-daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menunggu subsidi dari pemerintah pusat, karena adanya peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pembangunan di daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan

memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah bertekad untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah baik dalam aspek administrasi pemerintahan maupun dalam aspek pengelolaan program pembangunan lembaga-lembaga pemerintahan dan pelaku-pelaku pembangunan di daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, dimana dalam pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaran otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Peran otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. (Josef Riwu Kaho, 1997 : 123).

Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan. Dengan adanya sumber penerimaan, pemerintah daerah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas serta tujuan yang akan dicapai.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta

komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.

Berikut adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tahun anggaran 2000 – 2009 (secara global, adapun rincian ada di lampiran 1) :

Tabel 1.1
Perkembangan PAD Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2000 - 2009

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
1	2000	10.562.114.403,50	15.933.834.270,57
2	2001	25.920.352.000,00	27.599.586.984,27
3	2002	35.784.476.000,00	40.745.979.995,36
4	2003	40.385.160.000,00	46.282.025.900,49
5	2004	71.148.106.000,00	77.110.638.933,99
6	2005	81.815.016.600,00	87.961.119.316,82
7	2006	86.596.007.236,46	101.612.882.106,89
8	2007	115.762.898.716,00	117.461.704.186,47
9	2008	128.022.893.572,00	138.756.983.539,80
10	2009	157.633.849.936,00	168.302.821.579,56

Sumber : Kantor Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah kab. Gresik

Dari tabel 1.1 diperoleh data bahwa perkembangan PAD Kabupaten Gresik dalam sepuluh tahun terakhir ini (2000 – 2009) selalu mengalami peningkatan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun perolehan PAD terendah terlihat di tahun 2000 dengan angka realisasi Rp15.933.834.270,57 dari target Rp10.562.114.403,50. Sedangkan perolehan tertinggi terlihat pada tahun 2009 sebesar Rp168.302.821.579,56 dari target Rp157.633.849.936,00.

Sebagaimana diketahui, tahun 2009 Bupati Gresik Robbach Ma'sum menerima "hadiah" sebesar Rp 24,9 miliar dari Menkeu Sri Mulyani atas prestasinya mengelola APBD dengan baik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 54 daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang berprestasi dalam mengelola keuangan. Bahkan PAD Gresik, menempati tiga besar di Jatim bersama Surabaya dan Sidoarjo. Itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Yetty Sri Suparyati. (Dispenda Kab Gresik, 2010).

Besarnya tingkat Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang menyangkut komponen – komponen PAD yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka Gresik akan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa

Kabupaten Gresik pada kemajuan dan membawa masyarakat Gresik pada keadaan yang sejahtera.

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik. Alasan memilih Kabupaten Gresik sebagai daerah penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih kompleks dan mempunyai laju pembangunan yang lebih menonjol.,

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan melihat tingkat pendapatan asli daerahnya melalui sumber-sumber penerimaan daerah, maka penelitian ini mengambil judul: **“FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pajak (X_1) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar pengaruh retribusi (X_2) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik?

4. Seberapa besar pengaruh lain-lain PAD yang sah (X_4) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak (X_1) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi (X_2) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lain-lain PAD yang sah (X_4) terhadap penerimaan PAD Kabupaten Gresik.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah kedalam permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk pembangunan dan dalam

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab.

3. Bagi Pihak lain

Sebagai bahan informasi pendukung bagi para pembaca atau peneliti lainnya tentang keuangan daerah khususnya PAD di Kabupaten Gresik.

